

Dilema Implementasi *E-Government*: Analisis Partisipasi Masyarakat Petani di Kabupaten Gunungkidul

Ferri Wicaksono

Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas AMIKOM Yogyakarta

Email : wicaksono.ferri@amikom.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pesatnya perkembangan teknologi informasi global telah mendorong pergeseran paradigma masyarakat menuju era masyarakat digital. Kenyataan tersebut mengarahkan pemanfaatan media elektronik secara massif dalam birokrasi pelayanan publik di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, sejalan dengan Inpres No. 3 Tahun 2003. Dilematis ketika Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sedang mengupayakan *e-government* sebagai sebuah reformasi birokrasi pelayanan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat sebagai penerima manfaat layanan, ternyata ada elemen masyarakat petani yang cenderung sulit untuk mengadopsi teknologi baru. Secara konsisten Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah mengembangkan website hingga level kecamatan berjumlah 18 kecamatan dan level desa berjumlah 144 desa dengan domain yaitu “nama desa-kecamatan.desa.id”, dikenal dengan Sistem Informasi Desa (SID). Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif eksploratif untuk memaparkan keterbatasan masyarakat petani dalam pemanfaatan *e-government*. Situasi tersebut bisa memicu hambatan optimalisasi penerapan *e-government* di Indonesia. Penulis menemukan keterbatasan masyarakat petani di Kabupaten Gunungkidul dalam pemanfaatan *e-government* disebabkan oleh 2 (dua) aspek yakni minimnya pembiasaan dalam pemanfaatan media teknologi informasi dan karakteristik masyarakat paguyuban yang melekat dalam aktivitas sosial masyarakat petani di Kabupaten Gunungkidul. Karakter masyarakat petani cenderung sulit untuk dikorelasikan dengan perkembangan teknologi informasi digital dalam aktivitasnya, sehingga sulit menciptakan pembiasaan aktivitas pemanfaatan media internet untuk keseharian.

Kata Kunci : e-government, pelayanan publik, masyarakat petani, keterbatasan

Abstract

This research is located in Gunungkidul Regency, Yogyakarta Special Region (DIY). The rapid development of global information technology has driven a paradigm shift in society towards the era of digital society. This fact directs the massive use of electronic media in the public service bureaucracy in Indonesia. In order to realize a clean, transparent public service and be able to answer the demands of change effectively, in line with Presidential Instruction No. 3 of 2003. Dilemma when the Gunungkidul Regency Government is seeking e-government as a reform of the public service bureaucracy that is intended for the community

as the recipient of service benefits, there are elements of farmer communities that tend to be difficult to adopt new technologies. The Gunungkidul Regency Government has consistently developed a website up to the sub-district level totaling 18 sub-districts and village levels totaling 144 villages with domains namely "name of village-sub-districts.desa.id", known as the Village Information System (SID). The author uses descriptive exploratory research methods to explain the limitations of peasant communities in the use of e-government. This situation can trigger barriers to optimizing the implementation of e-government in Indonesia. The author finds the limitations of the farming community in Gunungkidul Regency in the use of e-government due to 2 (two) aspects namely the lack of habituation in the use of information technology media and the characteristics of community associations that are inherent in the social activities of farmers in Gunungkidul Regency. The character of the farming community tends to be difficult to correlate with the development of digital information technology in its activities, making it difficult to create an habit of using internet media for everyday life.

Keywords : *e-government, public service, farmer community, limitations*

A. PENDAHULUAN

E-government diperkenalkan sebagai sebuah konsep baru dalam penyelenggaraan birokrasi layanan publik mengikuti perkembangan masyarakat informasi. *E-government* menurut definisi Bank Dunia (The World Bank Group, 2001), *e-government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, business, and other arms of government.* Berdasarkan definisi di atas, aplikasi *e-government* merujuk pada penggunaan teknologi informasi (utamanya jaringan internet) di lembaga pemerintah guna transformasi hubungan dengan melibatkan pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat. Dorongan masyarakat Indonesia menuju masyarakat informasi telah tercantum pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, pada Lampiran I Tuntutan Perubahan poin 2.

Hindman (2000) menjelaskan bahwa teknologi informasi memberikan solusi alternatif untuk berkomunikasi kepada masyarakat yang secara geografis terisolasi, namun tetap saja warga pedesaan yang diharapkan dapat memanfaatkan kelebihan teknologi informasi ini tetap tertinggal oleh masyarakat perkotaan, karena infrastruktur telekomunikasi yang terbatas, dan permasalahan budaya. Sementara hasil studi Feldman (2001) lebih menegaskan bahwa “masyarakat pedesaan lebih cenderung enggan untuk mengadopsi teknologi baru” baik itu produk maupun jasa jika dibandingkan masyarakat perkotaan mereka yang lebih bersedia untuk menjadi *trendsetter* (dalam Faziharudean, T. M., 2005). Ketidakmauan beberapa individu masyarakat di suatu daerah dalam pemanfaatan layanan publik *e-government*, menjadikan penyelenggaraan *e-government* kurang optimal.

Di Kabupaten Gunungkidul dalam mendukung penyelenggaraan *e-*

government terus gencar dalam optimalisasi aplikasi dan infrastruktur. Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul hingga saat ini telah mengembangkan 57 aplikasi yang dimanfaatkan oleh dinas terkait dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan infrastruktur jaringan, saat ini masih terus dilakukan migrasi menuju pemanfaatan *fiber optik*. Disamping itu berdasarkan informasi Diskominfo bahwa seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul juga telah dapat menikmati jaringan internet. Disamping itu di tingkat tiap kecamatan juga telah disediakan internet publik oleh pemerintah setempat guna mengedepankan keterbukaan akses informasi masyarakat desa. Bahkan secara konsisten Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah mengembangkan website hingga level kecamatan berjumlah 18 kecamatan dan level desa berjumlah 144 desa dengan domain yaitu “nama desa-kecamatan.desa.id”. Dikenal dengan Sistem Informasi Desa (SID).

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memberi nama SID dengan “*Sida Samekta*” yang artinya Sarana Mewujudkan Desa Aktif dan Sejahtera, sedangkan untuk SIK diberi nama “*Gumbregah*” dengan arti Guna Mewujudkan Masyarakat Gunungkidul Sejahtera. SID berupaya mengakomodasi akses layanan dan informasi desa, seperti pengurusan surat pindah, pengurusan SKCK, pembuatan akte kelahiran, tata kelola pemerintahan desa, analisis potensi desa, pendataan penduduk dan sebagainya. SID juga telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Kabupaten (SIK). Integrasi tersebut guna menyajikan data desa yang valid. Sebagaimana keterangan Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi, manfaat yang bisa diambil dari

pemanfaatan SID adalah dorongan kepada perangkat desa untuk bisa *melek* teknologi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga masyarakat mudah dalam mengakses informasi desa.¹

Kabupaten Gunungkidul sangat identik dengan wilayah pedesaan. Wilayah di Kabupaten Gunungkidul teridentifikasi dengan istilah desa dan terbagi menjadi 5 (lima) jenis yakni:²

- a. **Desa/Kelurahan Tepi Laut** adalah desa/kelurahan yang sebagian atau seluruh wilayahnya bersinggungan langsung dengan laut, baik berupa pantai maupun tebing karang.
- b. **Desa/Kelurahan bukan tepi laut** adalah desa/kelurahan yang wilayahnya tidak bersinggungan langsung dengan laut.
- c. **Desa/Kelurahan Lereng/Puncak** adalah desa/kelurahan yang sebagian besar wilayahnya berada dipuncak gunung/pegunungan atau terletak diantara puncak sampai lembah.
- d. **Desa/Kelurahan lembah** adalah desa/kelurahan yang wilayahnya sebagian besar merupakan daerah rendah yang terletak diantara dua gunung/pegunungan atau daerah yang mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya.
- e. **Desa/Kelurahan dataran** adalah desa/kelurahan yang sebagian besar

¹Markus Yuwono, "Seluruh Desa di Gunungkidul Punya "Website" yang Terintegrasi ke SID", Kompas.com, 25 April 2017, <http://regional.kompas.com/read/2017/04/25/15083651/seluruh.desa.di.gunungkidul.punya.website.yang.terintegrasi.ke.sid> diakses pada 20 Oktober 2017

²Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka Tahun 2017

wilayahnya tampak datar, rata, dan membentang.

Sementara sebagian besar individu masyarakat Gunungkidul yang mayoritas petani yakni sebesar 22,96%. Karakteristik masyarakat petani di Kabupaten Gunungkidul memiliki kerentanan yang memicu tidak efektifnya pemanfaatan *e-government*.

Bertolak dari latar belakang masalah sebagaimana dipaparkan di atas, maka secara general peneliti memutuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana pemanfaatan *e-government* pada masyarakat petani Kabupaten Gunungkidul?”

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. E-Government

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, pada Lampiran I Tuntutan Perubahan poin 2 mendefinisikan *e-government* sebagai upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu:

- b. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;
- c. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan *e-government* diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu:

- a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
- b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
- c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
- d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Sesuai dengan konteks penelitian ini yakni dinamika pemanfaatan *e-government* di Indonesia pada khususnya, sehingga definisi *e-government* beserta penjelasannya yang tercantum dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 tersebut menjadi acuan utama penulis dalam memahami konsep *e-government*.

Inpres No. 3 Tahun 2003 diikuti dengan Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-government* Lembaga dari Kementrian Kominfo. Selain itu juga diterbitkan Keputusan Presiden

Nomor 20 Tahun 2006 terkait Pembentukan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas). Detiknas bertugas merumuskan peraturan umum dan arah strategis pembangunan nasional, melalui penggunaan *ICT*. Selanjutnya Kementerian Komunikasi dan Informasi pada tahun 2004 menerbitkan 6 (enam) garis pedoman yang terdiri dari:

- a. Standar kualitas dan cakupan pelayanan, serta pengembangan aplikasi *e-service*.
- b. Pelembagaan, wewenang, informasi, dan keterlibatan bisnis dalam pengembangan *e-government*.
- c. Pengembangan tata kelola yang baik dan manajemen perubahan.
- d. Pelaksanaan proyek *e-government* dan penganggaran.
- e. Standar kompetensi pengelola *e-government*.
- f. *Blueprint* aplikasi *e-government* bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. Masyarakat Petani

Pengertian petani adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian sebagai mata pencaharian utamanya. Secara garis besar terdapat tiga jenis petani, yaitu petani pemilik lahan, petani pemilik yang sekaligus juga menggarap lahan, dan buruh tani. Masyarakat petani secara umum sering dipahami sebagai suatu kategori sosial yang seragam dan bersifat umum. Artinya, sering tidak disadari adanya diferensiasi atau perbedaan-perbedaan dalam berbagai aspek yang terkandung dalam komunitas petani ini. Sebagai contoh, diferensiasi dalam komunitas petani itu akan terlihat berdasar atas perbedaan dalam tingkat perkembangan masyarakatnya, jenis tanaman yang mereka tanam, teknologi

atau alat-alat yang mereka gunakan, sistem pertanian yang mereka pakai, topografi atau kondisi-kondisi fisik-geografik lainnya. Diantara gambaran-gambaran yang bersifat diferensiatif pada kalangan masyarakat petani pada umumnya adalah perbedaan antara petani bersahaja, yang juga sering disebut petani tradisional (termasuk golongan peasant) dan petani modern (termasuk farmer atau agricultural entrepreneur).

Secara garis besar golongan pertama adalah kaum petani yang masih tergantung dan dikuasai alam karena rendahnya tingkat pengetahuan dan teknologi mereka. Produksi mereka lebih ditujukan untuk sebuah usaha menghidupi keluarga, bukan untuk tujuan mengejar keuntungan (*profic oriented*). Sebaliknya, farmer atau agricultural entrepreneur adalah golongan petani yang usahanya ditujukan untuk mengejar keuntungan (*profic oriented*). Mereka menggunakan teknologi dan sistem pengelolaan modern dan menanam tanaman yang laku di pasaran. Mereka mengelola pertanian mereka dalam bentuk agrobisnis, agro industri atau bentuk modern lainnya, sebagaimana umunya seseorang pengusaha yang profesional menjalankan usahanya (Rahardjo.1999:63)

Menurut Ferdinand Tonnies (dalam Soekanto, 1990: 132), *gemeinschaft* atau lebih dikenal dengan istilah paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya mempunyai hubungan batin, murni dan alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasacinta dan rasa kesatuan bathin yang memang telah dikodratkan. Kehidupan tersebut dinamakan juga bersifat nyata dan organis, sebagaimana dapat diumpamakan dengan organ tubuh manusia atau hewan. Bentuk ini dapat ditemukan dalam

kehidupan masyarakat desa, keluarga, kerabat, dan sebagainya.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif eksploratif. Jenis penelitian kualitatif digunakan agar dapat meminimalkan jarak antara peneliti dan informan. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³ Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran secara utuh berkaitan dengan suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti ditempatkan sebagai alat penelitian utama. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan pemanfaatan *e-government* pada masyarakat petani Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Kabupaten Gunungkidul sejatinya telah memasuki fase masyarakat digital yang ditandai sudah terhubungannya dan tersedianya jaringan internet di seluruh wilayah desa/kelurahan se-Kabupaten Gunungkidul dimana keseluruhan sudah dalam proses migrasi *fiber optik*, seluruh aktivitas layanan publik yang diselenggarakan oleh OPD sudah memanfaatkan jaringan internet dan aplikasi pendukung layanan publik, hingga yang terakhir sudah tersedianya SID dalam *platform* website di tiap desa/kelurahan se-Kabupaten

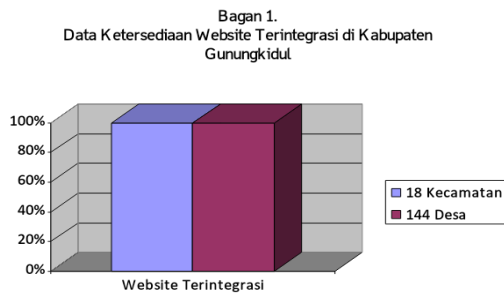
Gunungkidul yang sudah terintegrasi dengan SIK.

Dilematis ketika inovasi layanan publik *e-government* yang coba dioptimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terbatas dengan kondisi masyarakat setempat yang masih pragmatis dalam penerimaan dan pemanfaatan akses layanan publik berbasis TIK. Fakta tersebut menjadi permasalahan sangat mendasar yang dihadapi pada era digital. Dimana segala akses layanan publik serta merta dikembangkan berbasis TIK guna memberikan kemudahan akses bagi masyarakat sebagai *customer* ataupun penerima manfaat layanan, namun disisi lain *customer* (dalam hal ini masyarakat Kabupaten Gunungkidul) masih belum mampu menerima ataupun memanfaatkan secara massif akses layanan publik berbasis TIK tersebut. Secara garis besar menurut penulis yang menjadi akar permasalahan masih belum efektifnya pemanfaatan *e-government* di Kabupaten Gunungkidul lebih disebabkan *gap* karakteristik antara masyarakat petani, dengan kekhasan aktivitasnya yang dapat dikatakan masih jauh dari pemanfaatan teknologi informasi sehingga sulit dikontekskan menjadi masyarakat digital.

Dengan kondisi teknologi informasi sudah mampu menjangkau menyeluruh di kawasan Kabupaten Gunungkidul namun masyarakat sebagai penerima manfaat cenderung tidak secara signifikan memanfaatkan dalam aktivitas keseharian terutama dalam akses layanan publik secara mandiri. Sehingga pemanfaatan *e-government* tidak efektif dimana tujuan awalnya ingin menyediakan kebutuhan layanan publik yang lebih efektif dan menciptakan kemandirian masyarakat dalam akses layanan tersebut. Ketersediaan infrastruktur pendukung

³ Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. hal. 4

pengembangan e-government di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dalam bagan 1 dibawah ini:



Sumber : Diskominfo Kabupaten Gunungkidul

Berdasarkan bagan 1 tersebut dijelaskan bahwa Kabupaten Gunungkidul telah melakukan pengembangan infrastruktur IT secara fasilitatif di seluruh desa dan kecamatan. Dengan rincian mempunyai akses internet publik di 18 kecamatan, dan website atau SID (Sistem Informasi Desa) di 144 desa/kelurahan yang telah terintegrasi langsung di website kabupaten. Sehingga disimpulkan bahwa persoalan pengembangan *e-government* di Kabupaten Gunungkidul bukan lagi terkait infrastruktur.

Persoalan utama pengembangan *e-government* di Kabupaten Gunungkidul bukan pula terletak pada kondisi geografis suatu wilayah maupun infrastruktur wilayah, namun aspek social budaya seperti latar belakang pekerjaan dan karakteristik masyarakat juga mempengaruhi pola dan aktivitas pemanfaatan teknologi informasi tersebut dalam keseharian sehingga akan berpengaruh pada efektivitas pengembangan *e-government* di kabupaten tersebut.

Pertama, karakteristik masyarakat paguyuban yang sudah melekat diantara masyarakat Pemerintah Gunungkidul. Menurut Ferdinand Tonnies (dalam Soekanto, 1990: 132), *gemeinschaft* atau

lebih dikenal dengan istilah paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya mempunyai hubungan batin, murni dan alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rascinta dan rasa kesatuan bathin yang memang telah dikodratkan. Kehidupan tersebut dinamakan juga bersifat nyata dan organis, sebagaimana dapat diumpamakan dengan organ tubuh manusia atau hewan. Bentuk ini dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat desa, keluarga, kerabat, dan sebagainya.

Dimana dalam rutinitasnya memiliki kecenderungan dalam mengakomodasi kepentingan masih bersifat kelompok, sangat jarang bersifat mandiri. Sehingga di dalam suatu kelompok tersebut selalu ada 2 (dua) jenis karakter yakni 1). Akomodatif atau seseorang yang biasanya peka terhadap kebutuhan orang lain dan berusaha memfasilitasi kebutuhan orang lain; 2). Pasif atau cenderung tidak memiliki kepekaan terhadap orang lain dan menggantungkan dirinya pada orang lain.

Akses internet mereka sebagian besar intensitasnya hanya pada aktivitas media social, sehingga dari keseluruhan informan tidak mampu menjelaskan atau bahkan sangat asing dengan istilah *e-government*. Meskipun tiap desa sudah memiliki fasilitas SID, namun sangat jarang masyarakat mengakses secara langsung berkaitan dengan keperluan administratifkependudukan. Kebanyakan diantara kelompok masyarakat tersebut sudah mempunyai seseorang yang secara kolektif membantu dalam keperluan tersebut, semisal Pak Dukuh ataupun perangkat desa setempat. Situasi ini yang sudah membudaya dan secara tidak langsung menyebabkan tingkat

kemandirian masyarakat dalam akses layanan public menjadi sangat kecil.

Kedua, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Gunungkidul bermata pencaharian sebagai petani/pekebun. Aktivitas bertani secara tidak sadar sedikit menjauhkan individu dari kemajuan teknologi. Saat ini sudah berkembang masyarakat digital, dimana interaksi antarmanusia digerakkan dengan teknologi serba digital: komputer, internet, mesin ATM, telepon, handphone, dan sebagainya, semuanya digerakkan secara digital. Kita dapat membeli sesuatu hanya dengan menggesek kartu ATM dan menekan beberapa nomor PIN, demikian halnya untuk membayar tagihan kamar hotel, membeli tiket, dan sebagainya. Pengiriman uang dapat dilakukan dalam hitungan detik hanya dengan menekan beberapa digit nilai uang yang akan dikirim dan beberapa digit nomor rekening tujuan. Bukan uang yang dikirim, melainkan hanya sederet angka yang berpindah dari rekening satu ke rekening yang lain (Martono, 2012: 292). Masyarakat petani sulit dikategorikan sebagai masyarakat digital karena dalam aktivitasnya bertani sangat jauh dari unsur digitalisasi tersebut terutama bagi masyarakat desa, sehingga kemanfaatan teknologi informasi hingga internet belum cukup dirasakan oleh masyarakat petani sehingga belum ada kesadaran kolektif dari individu masyarakat. Situasi tersebut pula juga menjadi hambatan dalam sosialisasi pemanfaatan *e-government* di Kabupaten Gunungkidul karena aktivitas dan kebiasaan masyarakat petani tersebut dapat dikatakan “sulit menerima” pemanfaatan teknologi digital.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis di dalam tulisan ini, penulis menyimpulkan bahwa karakteristik sebagian besar individu masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang mayoritas petani dan memiliki karakteristik paguyuban cenderung menghambat proses pengembangan *e-government*. Dalam kebiasaan paguyuban bahwa terdapat aktivitas fasilitasi kolektif yang diperankan oleh aktor tertentu menjadikan sulit terciptanya kemandirian masyarakat dalam akses layanan publik. Sementara karakter masyarakat petani juga cenderung sulit untuk dikorelasikan dengan perkembangan teknologi informasi digital dalam aktivitasnya, sehingga sulit menciptakan pembiasaan aktivitas pemanfaatan media internet untuk keseharian. Disamping itu minimnya pembiasaan dalam pemanfaatan media teknologi informasi juga menjadi keterbatasan masyarakat petani di Kabupaten Gunungkidul dalam penerimaan *e-government*.

2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, permasalahan utama pemerintah setempat dalam pengembangan *e-government* terletak pada keterbatasan daya tanggap masyarakat dalam menerima model pelayanan publik baru yang berbasis media teknologi informasi (IT). Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah setempat dapat melakukan beberapa tahapan solusi yang dimulai pada level padukuhan, RT, dan RW sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelatihan pejabat dukuh, RT, dan RW dalam pemanfaatan media IT sebagai instrumen pelayanan publik.
- 2) Memberikan fasilitasi sarana dan prasarana IT termasuk jaringan

internet (paket data dan biaya) di level padukuhan, RT, dan RW untuk menunjang pelayanan publik.

- 3) Membuat anjuran penggunaan media IT dalam aktivitas rapat, musyawarah warga, hingga pengurusan surat menyurat di level padukuhan, RT, dan RW sehingga membuat pembiasaan baru bagi masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan guna menciptakan pembiasaan baru secara massif di masyarakat terkait pemanfaatan IT sebagai media layanan publik, sehingga ke depan memudahkan pengembangan *e-government* di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Castells, Manuel. 1996. *The Rise of The Network Society (The Information Age: Economy, Society, and Culture)*. London: Willey-Blackwell.
- Denzin, KN & Lincoln, Y. 2000. *Hand Book of Qualitative Research*. Thousand Oak California: Sage Publications.
- Faziharudean, Tengku Mohamed. 2005. *Digital Divide in Malaysia: Examining The Issues of Income, Workplace and Geographical Difference in Diffusing ICT to the Mass Public*. Thesis (doctoral) tidak dipublikasikan, Waseda University.
- Hargittai, Eszter. 2003. *The Digital Divide and What To Do About It*. New Economy Handbook. pp. 1-22.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas).
- Camacho, K. 2005. *Digital Divide, Multicultural Perspectives on Information Societies*. C&F Editions.
- Martono, Nanang. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Postkolonial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.
- Molnar, S. 2003. *The Explanation Frame of The Digital Divide*. Proceedings of the IFIP summer school 'Risks and challenges of the networked society'. Karlstad University, August.
- Ngafifi, Muhamad. 2014. *Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya*. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi. Volume 2, Nomor 1.
- Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). 2001. *Understanding The Digital Divide*. Paris: OECD Publication.
- Praditya, Didit. 2014. *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Tingkat Pemerintahan Desa*. Jurnal Penelitian Komunikasi, Vol. 17, No.2, pp. 129-140.
- Soekanto, Soejono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

- Sugihartati, Rahma. 2014. *Perkembangan Masyarakat Informasi & Teori Sosial Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sugihen, Bahrein T. 1996. *Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Venkatesh, V., Morris, M.G., Davis, G.B., and Davis, F.D. 2003. *User Acceptance of Information Technology: Toward A Unified View*. MIS Quarterly. 27(3): pp 425-478.
- Wenhong, Chen & Barry Wellman. 2003. *Charting and Bridging Digital Divide: Comparing Socio-Economic, Gender, Life Stage and Urban Internet Access and Use in Eight Countries*. s.l.: AMD Global Consumer Advisory Board (GCAB).
- Wolfgang E. Ebbers, Marloes G.M. Jansen, and Alexander JAM. van Deursen. 2016. *Impact of the Digital Divide on E-Government: Expanding from Channel Choice to Channel Usage*. Government Information Quarterly. GOVIN-01194; No. of pages:8;4C: